

ABSTRAK

Permukiman kumuh perkotaan masih menjadi permasalahan yang banyak dihadapi kota-kota besar khususnya di Indonesia. Salah satu program pemerintah guna menangani permukiman kumuh adalah Program Kotaku. Program kolaborasi Kotaku menggandeng organisasi pemerintah daerah (OPD) dari berbagai bidang untuk berkolaborasi dalam hal pendanaan dan pembangunan infrastruktur. Penilaian tingkat efektivitas kolaborasi OPD menjadi satu hal penting untuk diteliti karena adanya keterbatasan kemampuan dan tugas dari masing-masing OPD. Efektivitas berkaitan dengan keberhasilan rencana dan implementasi kolaborasi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat efektivitas kolaborasi OPD dalam pengentasan permukiman kumuh di Benoyo berdasarkan proses kolaborasi.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kolaborasi OPD dalam pengentasan permukiman kumuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden penelitian ini meliputi anggota OPD, fasilitator Program Kotaku, dan stakeholder terkait di permukiman Benoyo yang berjumlah 30 responden serta masyarakat yang tinggal di permukiman Benoyo dengan jumlah 60 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dan skoring berdasarkan data dari lapangan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain analisis terkait aspek fisik dan non fisik di permukiman Benoyo, analisis peran OPD dalam pelaksanaan kolaborasi, analisis proses kolaborasi, dan analisis tingkat efektivitas kolaborasi OPD.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran OPD dalam kolaborasi didominasi keterlibatan tim Kotaku dan Dinas PKP. Tingkat efektivitas dianalisis berdasarkan penilaian OPD dan kepuasan masyarakat didapatkan hasil pada tindakan kolaborasi dinilai efektif, kategori cukup efektif pada proses dialog tatap muka, pemahaman bersama, pengungkapan, deliberasi, determinasi, kepemimpinan, sumber daya, dan dampak, kategori kurang efektif pada proses legitimasi internal. Hal ini disebabkan kemampuan stakeholder dan pemimpin (Pokja PKP) dalam menjalankan proses kolaborasi dinilai belum maksimal. Sehingga perlu ditingkatkan melalui evaluasi kinerja Pokja PKP sebagai koordinator OPD, perlu adanya payung hukum yang sah untuk mengatur pelaksanaan kolaborasi, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan, dan perlunya kesadaran setiap anggota OPD yang terlibat dalam kolaborasi untuk menjalankan setiap proses dengan maksimal dan efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Kolaborasi OPD, Pengentasan Permukiman Kumuh